

Mengapa Utang Dirisaukan

Oleh: Fauzi Aziz

Senin , 11 Maret 2019 | 12:00

http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/6914/mengapa_utang_dirisaukan

CERITA tentang utang menarik dibahas karena sekarang ini masalah utang bukan lagi menjadi beban negara-negara berkembang saja, tetapi juga menjadi beban dari negara-negara maju. Artinya utang telah menjadi masalah dunia seutuhnya.

Utang dirisaukan karena dapat menimbulkan beban berat bagi yang berutang. Apalagi kalau utangnya menjadi overborrowing yang akibatnya menjadi overlanding, yang menyebabkan utang banyak dirisaukan.

Selain itu juga yang sudah umum banyak diketahui adalah bahwa konsekuensi akibat beban utang yang menggantung bisa sangat dramatis dampaknya, seperti yang terjadi pada tahun 2008 saat Uni Eropa (UE) menghadapi krisis utang.

Sebagai informasi dapat dicatat bahwa pada akhir tahun 2012, jumlah utang jangka pendek negara-negara UE yang jatuh tempo sekitar 1,1 triliun euro atau setara Rp 13.200 triliun. Masalahnya adalah bahwa di saat itu, dana cadangan yang tersedia di European Financial Stability Facilities (EFSF) hanya sekitar 400 miliar euro atau setara Rp 5.280 triliun. Analisis keuangan saat itu sampai membuat prediksi bahwa jikapun EFSF punya dana cadangan 1 triliun euro tidak akan mampu mengatasi ledakan utang hanya di dua negara saja, yakni Spanyol dan Italia, apalagi untuk seluruh negara-negara UE.

Banyak pihak mengatakan bahwa utang tidak bisa dihindari sepanjang dananya dipakai untuk hal-hal yang bersifat produktif. Sepakat dengan pandangan ini asal tidak overborrowing dan overlanding. Negara yang rajin berutang umumnya karena mengalami kekurangan likuiditas untuk membangun atau agar investasi pemerintah dapat dilakukan secara optimal untuk merealisasikan proyek-proyek strategis nasional yang economic outcome-nya tinggi, seperti pada pembangunan infrastruktur, pembangunan industri pionir dan sektor ekonomi lainnya.

Di lain pihak, berapa pun besarnya beban utang yang harus dipikul, semua negara yang berutang pasti berupaya untuk menghindari kegagalan dalam pengangsuran karena beban pengangsuran utang sering kali mengakibatkan negara-negara pengutang harus mengorbankan program-program pendidikan dan kesehatan atau program jaring pengaman sosial, dan kesejahteraan rakyatnya.

Sekali lagi inilah mengapa ketika hampir semua pihak sangat merisaukan saat komitmen utang negara terus menerus bertambah meskipun rasionya terhadap PDB masih jauh di bawah ambang batas aman yakni 60% dari PDB. Apalagi yang ratio utangnya sudah di atas 60% dari PDB seperti yang dialami oleh negara-negara uni eropa.

Negara yang masih terus berutang tentu harus bisa menjaga kredibilitasnya agar kreditur, dan pelaku pasar percaya bahwa kondisi perekonomian negara pengutang kondisinya baik. Di antaranya adalah harus memiliki cadangan devisa yang cukup besar.

Status negaranya adalah harus layak investasi, yang berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat internasional, dianggap mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dengan resiko gagal bayar yang sangat rendah. Karena tiap tahun selalu ada utang baru, maka Indonesia harus mempunyai pendapatan yang cukup besar.

Dua sumber utamanya adalah pendapatan dari pajak, dan dari devisa hasil ekspor. Jika pendapatan utama tersebut tidak maksimal, maka sudah pasti akan berdampak pada perubahan status layak investasi, sehingga berarti kepercayaan investor, kreditor dan pelaku pasar terhadap kinerja ekonomi akan turun. Per Februari 2019, menurut BI, cadangan devisa Indonesia sebesar 123,3 miliar dolar AS.

Kita boleh prihatin dengan persoalan utang ini. Bad news-nya adalah bahwa utang adalah beban anak cucu. Good news-nya adalah rasio utang terhadap PDB dan tingkat utang per kapita Indonesia merupakan salah satu yang rendah di dunia.

Namun demikian, kita juga harus bisa memahami bahwa kerisauan yang muncul hendaknya dapat direspon secara wajar. Alasan pihak yang risau ini cukup punya pertimbangan yang masuk akal yaitu karena dengan terlalu banyak berutang sering menimbulkan "kesulitan" dalam melakukan pengangsuran sehingga dorongan untuk melakukan moratorium muncul.

Kita tahu bahwa pinjaman internasional menjadi semacam pintu yang mempertemukan negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan IMF dan lembaga-lembaga keuangan internasional nasional lainnya ketika suatu negara mengalami kesulitan likuiditas. Satu catatan penting untuk kita pahami bersama sebagai pembelajaran bahwa negara acap_kali dihadapkan pada dua pilihan sulit.

Pertama, kegagalan membayar utang akan bisa berpotensi menimbulkan terjadinya keterpurukan ekonomi. Kedua, menerima bailout atau dana talangan dapat memunculkan sentimen negatif terhadap persoalan nasionalisme, karena khawatir kehilangan kedaulatan ekonomi.

Pelajaran dari Krisis 1998

Krisis likuiditas Asia tahun 1998 yang berdampak kepada Indonesia, telah membuat negeri ini harus menerima bailout dari IMF dengan syarat Indonesia harus total melaksanakan liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi ekonomi, supaya bisa bayar utang. Ini pelajaran sangat berharga, sehingga belanja dan pembiayaan dalam APBN harus dilaksanakan secara hati-hati dan produktif. Hindari membuat program dan kegiatan "kagetan" yang cenderung bersifat konsumtif. Sementara arahan kebijakan fiskalnya ditekankan untuk menjaga keberlangsungan keuangan negara guna menciptakan ketahanan dan kesinambungan fiskal.

Upaya ini harus dipahami para elit negeri ini karena defisit anggaran tiap tahun selalu ditutup dari utang. Kita tidak boleh bersikap pragmatis dalam mengelola kebijakan fiskal dan moneter karena banyak code of conduct yang harus dipatuhi.

Kita masih berharap dan sambil meminta petunjuk Tuhan, semoga masih ada dunia yang lebih baik. Menjadi lebih baik karena utang bisa dibayar. Selain utang secara finansial, masih ada utang lain yang harus dibayar yang jumlahnya juga tak kalah besar, yaitu kewajiban seluruh bangsa di dunia untuk penyelamatan bumi akibat perubahan iklim dan pemanasan global.

Terkait dengan ini, maka sesungguhnya apa yang menjadi pikiran adalah bagaimana caranya agar beban berat tersebut dapat diatasi. Kalau gagal, maka gagal negara-negara di dunia mengurus kehidupan di muka bumi.

Bagaimanapun, beban adalah ongkos yang harus dibayar, dan pasti akan membebani keuangan negara dan cadangan devisa negara. Dan jika beban - beban itu harus dilunasi, maka barangkali pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata harus bisa mencapai 7% atau lebih.

Faktor pendapatan negara menjadi penting untuk ditingkatkan, minimal dari dua sumber utama, yakni pendapatan yang berasal dari pajak maupun dari hasil ekspor dalam bentuk devisa karena utang valas harus dibayar dalam bentuk valas. Pendapatan devisa hasil ekspor barang dan jasa yang rendah akan menjadi pemacu resiko pembayaran utang, penerimaan pajak mana bisa untuk bayar utang.

Kerisauan hanya bisa dijawab dengan meningkatkan pendapatan, dan harus dihindari utang dibayar dengan pinjaman. Dalam hubungan ini, Debt Service Ratio (DSR) harus semakin baik. Ratio yang merupakan indikasi kemampuan membayar utang dari penerimaan pada neraca transaksi berjalan yang meliputi hasil ekspor barang dan jasa, serta yang berasal dari pendapatan primer dan sekunder.

Akhirnya, Indonesia harus mempunyai cadangan devisa yang cukup besar. Karena dengan memiliki cadangan devisa yang cukup, Indonesia akan nyaman mememanajementi resiko keuangan yang dihadapi.

Di lain pihak tentu akan memperkuat keyakinan terhadap negara maupun mata uangnya. Jika suatu negara mempunyai cadangan devisa yang cukup besar, kecil kemungkinan para investor akan panik dan kemudian kabur. Sebab itu, saatnya genjot ekspor, ekspor dan ekspor.

Semua sektor manufaktur kini yang masih beroperasi berikan status sebagai Eksportir Produsen untuk Tujuan Ekspor (EPTE). Selamatkan dulu existing industry dan sambil jalan membenahi investasi baru untuk tujuan ekspor. Berikan tax holiday untuk jangka waktu lima tahun flat sejak status EPTE diberikan. Fasilitas ini penting agar mereka mampu melunasi utang-utang komersialnya.

Penulis adalah pemerhati masalah ekonomi dan industri.